

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja						Keuangan			
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi (%)	Program	Pagu	Realisasi (%)	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Levelling Kapabilitas APIP /(Internal Audit Capacity Models/IACM)	Level	0	0	0.00			
					Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Indeks	0	0	0.00			

No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja						Keuangan				
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	0	0	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.460.000	9.907.870	94.72
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	12.310.000	11.792.100	95.79
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	34.995.040	8.413.000	24.04
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.661.000	1.439.600	54.10
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	73.609.480	22.342.500	30.35
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	153.682.200	111.685.970	72.67
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	79.983.640	9.454.600	11.82
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.661.000	1.439.600	54.10
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	27.027.050	16.091.680	59.54

No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja						Keuangan				
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	24.294.700	2.462.800	10.14
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	36.835.040	7.078.130	19.22
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.851.000	643.200	34.75
		3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	Nilai kematangan organisasi Inspektorat	Nilai	0	0	0.00					
		4	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	83	80.25	96.69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.284.534.412	5.049.818.199	60.95	
			Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	Indeks	0	0	0.00						
			Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	Orang/tahun	4	4	100.00						
			Jumlah Inovasi Inspektorat	Buah	0	0	0.00						
			IKM Inspektorat	Indeks	0	0	0.00						

B. FAKTOR PENDUKUNG

1. Kapabilitas APIP

Belum tersedia target atas indikator tujuan di Triwulan III Tahun 2025 karena proses penilaian oleh BPKP atas Kapabilitas APIP baru dilaksanakan di Triwulan II-III dan hasilnya baru terbit di akhir Desember setiap tahunnya sehingga target dan realisasinya baru muncul di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan Penilaian Mandirinya telah disiapkan sejak Triwulan I seperti pelaksanaan Audit Kinerja Lintas Sektoral atas Ketahanan Pangan yang sudah dimulai persiapan pengawasannya di Triwulan I 2025 yang akan digunakan sebagai sampel dalam penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 terkait audit kinerja. Kemudian rapat internal terkait realisasi renaksi tindak lanjut hasil penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 sebagai pertimbangan nilai di penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 yang juga telah di laksanakan di Triwulan I Tahun 2025. Kemudian di Triwulan II telah dibentuk Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Nomor 38 Tahun 2025, tanggal 4 Juni 2025.

2. Indeks Manajemen Risiko

Belum tersedia target atas indikator tujuan di Triwulan III Tahun 2025 karena proses penilaian oleh BPKP atas Indeks Penerapan Manajemen Risiko baru dilaksanakan di Triwulan III dan hasilnya baru terbit di Triwulan IV setiap tahunnya sehingga target dan realisasinya baru muncul di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan penilaian mandirinya telah disiapkan sejak awal tahun seperti evaluasi atas penyusunan register risiko dan dokumen RTP tahun 2025 serta monitoring implementasi RTP Tahun 2024. Kemudian penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang SPIP yang telah disosialisasikan di Triwulan II untuk membantu kelancaran dalam Penilaian Mandiri SPIP yang telah dilaksanakan di Triwulan II antara Bulan Juni 2025 oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri telah dilaksanakan oleh Tim Penjamin Kualitas Kabupaten Wonogiri di akhir Bulan Juni 2025. Selain itu, telah dilakukan rapat dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian tahun sebelumnya.

Level Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Belum tersedia target atas indikator tujuan di Triwulan III Tahun 2025 karena proses penilaian oleh BPKP atas Maturitas SPIP baru akan dilaksanakan di Triwulan III dan hasilnya baru terbit di Triwulan IV setiap tahunnya sehingga target dan realisasinya baru muncul di Triwulan IV. Namun persiapan pelaksanaan penilaian mandirinya telah disiapkan sejak awal tahun seperti evaluasi atas penyusunan register risiko dan dokumen RTP tahun 2025 serta monitoring implementasi RTP Tahun 2024. Kemudian penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang SPIP yang akan disosialisasikan di Triwulan II, Bulan Mei 2025 untuk membantu kelancaran dalam Penilaian Mandiri SPIP yang telah dilaksanakan di Triwulan II di awal Bulan Juni 2025 oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri telah dilaksanakan oleh Tim Penjamin Kualitas Kabupaten Wonogiri di akhir Bulan Juni 2025. Selain itu, telah dilakukan rapat dengan perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian tahun sebelumnya.

Nilai Kematangan Organisasi

Belum tersedia data untuk hasil penilaianya, di Triwulan III baru dilakukan penilaian mandiri oleh instansi dan dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pemda namun belum ada laporan hasil verifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Indikator sasaran yang telah terealisasi dengan capaian 100% pada :

Jumlah ASN Inspektorat yang Menjadi Agen Perubahan

Telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur untuk ASN yang akan menjadi agen perubahan di Triwulan II sesuai koordinasi dan rapat internal yang telah dilakukan di Triwulan I dengan 3 Agen Perubahan dari tahun sebelumnya dan penambahan 1 Agen Perubahan baru di tahun 2025. Kemudian di Triwulan II telah ditetapkan rencana aksi atas perubahan yang akan dilakukan oleh semua agen perubahan untuk kemudian direalisasikan di Triwulan III dan disusun laporannya di Triwulan IV.

Kemudian beberapa target atas indikator sasaran belum ditetapkan sampai dengan di Triwulan III sehingga untuk realisasinya juga masih 0, namun beberapa telah berjalan proses yang mendukung dalam pencapaian targetnya seperti :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Hasil penilaian akan terbit di akhir tahun setiap tahunnya sehingga belum muncul target dan realisasinya di Triwulan III. Namun data pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian telah dipersiapkan sejak Triwulan I seperti penyusunan rencana pendidikan pelatihan untuk penilaian IPASN yang dilanjutkan pendataan atas pegawai yang telah mengikuti diklat, seminar ataupun workshop dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III.

2. Jumlah Inovasi Inspektorat

Sesuai renstra tidak ditetapkan inovasi di Inspektorat untuk tahun 2025, namun telah dilakukan perubahan PK untuk ditargetkan 1 inovasi dan sudah di daftarkan di Gerbang Indah Wonogiri di Triwulan II. Namun proses penilaian atas inovasi yang di daftarkan masih berproses hingga Oktober.

3. IKM Inspektorat

Penilaian dilaksanakan di Triwulan IV sehingga belum muncul target dan realisasinya. Namun, proses pengumpulan data survey telah dipersiapkan dan diedarkan ke pengguna layanan di Inspektorat sejak Triwulan I hingga Triwulan II. Kemudian akan dilakukan juga Forum Group Discussion di Triwulan IV setelah penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di triwulan IV.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Kapabilitas APIP dan Indeks Manajemen Risiko

Belum terdapat hambatan yang krusial dalam mendukung proses persiapan penilaian Kapabilitas APIP maupun Indeks Manajemen Risiko

Level Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Belum terdapat hambatan yang krusial dalam mendukung proses penilaian mandiri Maturitas SPIP dan penjaminan kualitasnya

Nilai Kematangan Organisasi

Belum tersedia data untuk hasil penilaiannya, di Triwulan III baru dilakukan penilaian mandiri oleh instansi dan dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pemda namun belum ada laporan hasil verifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tidak ada hambatan yang berisiko menghambat pencapaian target di Triwulan II karena semua berjalan masih dalam proses. Hanya saja untuk Penilaian AKIP yang telah terealisasi dengan nilai 80,25 jika dibandingkan dengan targetnya di Triwulan II dengan target 83 maka simpulannya adalah belum dapat tercapai untuk capaian kinerjanya atas Penilaian AKIP Inspektorat. Hal ini disebabkan oleh perubahan cara penilaian AKIP yang lebih kompleks dan penetapan target di Renstra yang terlalu tinggi karena masih mendasarkan pada pencapaian atas cara penilaian AKIP yang lama sehingga mengakibatkan target atas AKIP dan IPASN tidak pernah tercapai yang tentunya mempengaruhi dalam penilaian evaluasi AKIP setiap tahunnya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kapabilitas APIP dan Indeks Manajemen Risiko

Tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan koordinasi dalam pembahasan atas laporan hasil penilaian Level Kapabilitas APIP dan Indeks Penerapan Manajemen Risiko dari BPKP

Level Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan koordinasi pembahasan atas laporan penilaian level penyelenggaraan maturitas SPIP dari BPKP

Nilai Kematangan Organisasi

Tindak Lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan koordinasi atas laporan hasil verifikasi penilaian kematangan organisasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tindak lanjut atas indikator sasaran penilaian AKIP yang belum mampu mencapai targetnya adalah diperlukan pemahaman mendalam tentang perubahan metode penilaian AKIP yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi area yang terpengaruh oleh perubahan tersebut dan menyesuaikan strategi serta kebijakan Inspektorat agar lebih sesuai dengan kriteria penilaian yang baru.

Wonogiri, 06 Oktober 2025



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MULYANTO, S.E.
Jabatan Pelapor : Sekretaris
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	1	Terselenggaranya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	%	88.87	88.87	100.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.284.534.412	5.049.818.199	60.95
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	1.1	Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	66.67	66.67	100.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.455.000	1.049.750	42.76
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	1.2	Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	%	100	100	100.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.494.023.755	4.733.456.696	63.16
		Jumlah Inovasi Inspektorat	1.3	Terselenggaranya administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	%	60	60	100.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	999.940	979.100	97.92
		IKM Inspektorat	1.4	Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	%	72	72.45	100.63	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.346.130	81.015.550	52.49
			1.5	Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	%	78	78	100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.313.100	36.210.980	26.76

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.6	Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Percentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	%	100	11	11.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.685.700	5.450.000	4.55
			1.7	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	75	75	100.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.133.900	132.179.971	52.63
			1.8	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Percentase pemeliharaan barang milik daerah	%	55	55	100.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.576.887	59.476.152	46.99

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kerjasama seluruh pegawai di Inspektorat yang kooperatif dalam mendukung pelaksanaan aktivitas operasional rutin kantor setiap bulannya.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan data dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai rencana aksi yang telah disusun

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Ketertiban pencatatan dan monitoring atas BMD pada Inspektorat

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Ketersediaan data kepegawaian dan ketertiban pembaharuan data kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Belum dapat terpenuhi sesuai rencana targetnya di Triwulan III

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya pelaksanaan jasa penunjang urusan kantor seperti pembayaran listrik, gaji pegawai kontrak serta peralatan perlengkapan kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketersediaan anggaran untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dari 8 Kegiatan pendukung program penunjang urusan masih terdapat 1 kegiatan yang belum tercapai sesuai targetnya sampai dengan Triwulan II yaitu :

Kegiatan Pengadaan BMD

Belum selesai untuk proses penetapan penyedia barang dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) karena harus menyesuaikan dengan index harga yang telah direncanakan sehingga masih terdapat barang yang belum dapat terealisasi sampai dengan Triwulan III.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Keterbatasan SDM di Inspektorat dengan PPKom dari Auditor sementara jumlah pengawasan dan aduan masyarakat yang harus ditangani semakin meningkat sehingga terjadi keterlambatan dari PPKom dalam menyusun KAK untuk pengajuan barang ke Bagian PBJ

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Melakukan monitoring terutama pada kegiatan yang belum tercapai di Triwulan III dan masih dalam proses agar capaian kinerja tetap dapat tercapai sesuai target kinerjanya di triwulan IV

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV , yaitu penyusunan dokumen penganggaran tahun 2026 sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi keuangan di Triwulan IV

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi BMD di Triwulan IV

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi kepegawaian di Triwulan IV

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Melanjutkan pelaksanaan administrasi umum di Triwulan IV

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Melakukan koordinasi dengan Bagian PBJ untuk realisasi yang belum terpenuhi di Triwulan III agar dapat terpenuhi di Triwulan IV

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melaksanakan pemenuhan jasa penunjang kantor di Triwulan IV

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melaksanakan pemeliharaan BMD sesuai rencana yang telah dituangkan dalam rencana aksi pencapaian target secara triwulanan

Wonogiri, 06 Oktober 2025

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	19	19	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	19.877.050	14.292.850	71.91
			1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.430.000	550.000	16.03
			1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	5	5	100.00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7.095.000	5.638.000	79.46
			1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	6	6	100.00	Reviu Laporan Kinerja	863.200	465.000	53.87

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi
		1.4	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00	Reviu Laporan Keuangan	6.258.850	5.895.350	94.19
		1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	142.500	71.25
		1.6	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	5	5	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2.030.000	1.602.000	78.92
		2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	29	29	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7.150.000	1.798.830	25.16
		2.1	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	100.00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1.150.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2.2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	28	28	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.000.000	1.798.830	29.98
3	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Percentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	3	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	3	3	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.661.000	1.439.600	54.10
			3.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	550.000	105.000	19.09
			3.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.111.000	1.334.600	63.22

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Koordinasi dan kerjasama yang baik dan lancar antara Inspektorat dan BPKD Kabupaten Wonogiri sehingga Rreviu atas Laporan Keuangan dapat terealisasi sesuai targetnya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Rreviu atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemeriksaan tindak lanjut di Triwulan III sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV karena pelaksanaan aktivitas telah selesai di Triwulan II dan monitoring tindak lanjut rekomendasinya juga telah terselesaikan di Triwulan III

Reviu Laporan Keuangan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan I sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Kerjasama Pengawasan Internal

Tindak lanjut hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang telah dilaksanakan di Triwulan III sehingga tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan monitoring tas rekomendasi/ catatan hasil telaah intern pada bidang terkait

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Triwulan IV

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Wonogiri, 06 Oktober 2025



Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	22	22	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	18.609.480	6.314.300	33.93
			1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	Reviu Laporan Kinerja	2.000.000	200.000	10.00
			1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	3	100.00	Pengawasan Desa	11.461.280	3.971.800	34.65

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.3	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	8	8	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2.030.000	0	0
			1.4	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.918.200	2.000.000	68.54
			1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	142.500	71.25
			2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	8	8	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	55.000.000	16.028.200	29.14
			2.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	8	8	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	55.000.000	16.028.200	29.14

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
3	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Percentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	3	Tersusunnya laporan pendampingan & Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Laporan	4	4	100.00	Pendampingan dan Asistensi	151.021.200	110.246.370	73.00
			3.1	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3	3	100.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	151.021.200	110.246.370	73.00
			4	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	3	3	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.661.000	1.439.600	54.10
			4.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	550.000	105.000	19.09

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.111.000	1.334.600	63.22

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Rreviu atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Pendampingan dan Asistensi

Kerjasama yang baik antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan monitoring MCSP-KPK di Triwulan III dan monitoring evaluasi perluasan desa anti korupsi

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendampingan dan Asistensi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Reviu Laporan Kinerja

Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKjIP yang sebagian telah dilaksanakan di Triwulan III akan dilanjutkan di Triwulan IV untuk yang belum dilakukan monitoring tindak lanjutnya

Pengawasan Desa

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, beberapa pengawasan desa akan dilakukan perubahan bentuk pengawasan dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku agar target kinerja tetap dapat tercapai.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Kerjasama Pengawasan Internal

Tindak lanjut hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang telah dilaksanakan di Triwulan III sehingga tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan monitoring tas rekomendasi/ catatan hasil telaah intern pada bidang terkait

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pendampingan dan Asistensi

Melanjutkan pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan SPI dan Monitoring MCSP-KPK Triwulan III di Triwulan IV

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Triwulan IV

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Wonogiri, 06 Oktober 2025

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi



ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
197006201994012001



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : Drs. EDY MARTONO, M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	28	28	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.760.000	3.358.870	89.33
			1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000	120.000	60.00
			1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	21	21	100.00	Reviu Laporan Kinerja	700.000	661.820	94.55
			1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	2	2	100.00	Pengawasan Desa	2.500.000	2.253.050	90.12
			1.4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	3	3	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	300.000	270.000	90.00
			1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	60.000	54.000	90.00

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
		2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	14	14	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.700.000	6.549.000	97.75	
		2.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	14	14	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.700.000	6.549.000	97.75	
3	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	3	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	810.000	796.400	98.32
			3.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	110.000	105.000	95.45
			3.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	700.000	691.400	98.77
			4	Tersusunnya laporan pendampingan & Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Laporan	5	5	100.00	Pendampingan dan Asistensi	11.500.000	10.995.700	95.61
			4.1	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	53	53	100.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.400.000	8.339.200	99.28

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4.2	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	53	53	100.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	200.000	0	0
			4.3	Terealisasinya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1	1	100.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.700.000	2.656.500	98.39
			4.4	Terealisasinya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	53	53	100.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	200.000	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Reviu Laporan Kinerja

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pengawasan Desa

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pendampingan dan Asistensi

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Pendampingan dan Asistensi

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan akhir Juli 2025 sehingga rencana target s.d akhir Juli 2025 tercapai 100% karena per 1 Agustus 2025 telah memasuki masa pensiun

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Pit. yang ditunjuk.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Reviu Laporan Kinerja

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Pengawasan Desa

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Kerjasama Pengawasan Internal

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Pit. yang ditunjuk.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Pit. yang ditunjuk.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Pit yang ditunjuk.

Pendampingan dan Asistensi

Telah tercapai 100% karena memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2025 sehingga dilakukan perubahan PK terkait perubahan targetnya dan realisasinya menjadi 100%. Kemudian sisa target tahunan yang belum tercapai menjadi target bagi Plt. yang ditunjuk.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Plt yang ditunjuk.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Plt yang ditunjuk.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Plt yang ditunjuk.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Memasuki pensiun di 1 Agustus 2025 sehingga tindak lanjut atas pemeriksaan sebelumnya dan target tahunan yang belum tercapai akan masuk dalam PK Irban pengganti atau Plt yang ditunjuk.



Inspektur

Wonogiri, 31 Juli 2025

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Drs. EDY MARTONO, M.M
196707051987021003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja

: DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.

Jabatan Pelapor

: Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

Nama Pimpinan yang Melakukan Monev

: MARDIANTO, S.E

Jabatan Pimpinan Pelapor

: Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi (%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (%)	
1	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	1	Tersusunnya laporan pendampingan & Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Laporan	5	5	100.00	Pendampingan dan Asistensi	21.633.700	1.023.200 4.73
			1.1	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	53	53	100.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	16.635.500	737.500 4.43

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	53	53	100.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.355.000	0	0
			1.3	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1	1	100.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	300.000	285.700	95.23
			1.4	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	53	53	100.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.343.200	0	0
2	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	2	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	8	8	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.535.040	4.114.430	23.46

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi
		2.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.230.000	2.181.000	67.52
		2.2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1	1	100.00	Reviu Laporan Kinerja	1.300.000	836.180	64.32
		2.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Desa	11.135.040	1.008.750	9.06
		2.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	140.000	88.500	63.21
		2.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	5	5	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.730.000	0	0
		3	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	10	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19.300.000	2.963.700	15.36

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			3.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	10	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19.300.000	2.963.700	15.36
4	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	4	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.851.000	643.200	34.75
			4.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	440.000	0	0
			4.2	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.411.000	643.200	45.58

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pendampingan dan Asistensi

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam pendampingan dan asistensi Pembangunan ZI dan Monitoring Pembangunan ZI di Triwulan I sesuai yang direncanakan sehingga dapat terealisasi sesuai targetnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan SPIP serta pelaporan monitoring LHKAN dan Evaluasi Internal RB Triwulan.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah yang baik sehingga pelaksanaan pendampingan SPIP dapat berjalan lancar dan tercapai targetnya 100% sesuai rencana dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah sehingga telah terealisasi evaluasi internal RB atas monitoring RB di Triwulan I,II dan III sesuai yang telah direncanakan dalam PKPT Tahun 2025

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Komitmen perangkat daerah terkait dalam merespon positif pembangunan ZI sehingga rencana pelaksanaannya di Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sesuai tergetnya

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh perangkat daerah sehingga monitoring dan pelaporan atas LHKAN dapat terlaksana sesuai ketentuan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), rencana pelaksanaannya masih di Triwulan IV

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Reviu atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pendampingan dan Asistensi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), rencana pelaksanaannya masih di Triwulan IV

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pendampingan dan Asistensi

Tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah pelaksanaan pendampingan dan evaluasi penyusunan register risiko strategis pemda, risiko strategis dan operasional perangkat daerah tahun 2026 serta pelaksanaan evaluasi internal reformasi birokrasi triwulan III

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tindak lanjut di Triwulan IV adalah persiapan untuk SPIP Tahun 2026 dengan melaksanakan pendampingan dan asistensi atas penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026 pada semua perangkat daerah

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan II sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan II sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV karena pelaksanaan aktivitas telah selesai di Triwulan II dan monitoring tindak lanjut rekomendasinya juga telah terselesaikan di Triwulan III

Pengawasan Desa

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Triwulan IV

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Wonogiri, 06 Oktober 2025



Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
197402061999032008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Percentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	18	18	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	19.995.040	6.051.800	30.27
			1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.430.000	1.700.000	49.56
			1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	Reviu Laporan Kinerja	2.000.000	1.825.000	91.25
			1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	3	100.00	Pengawasan Desa	12.335.040	2.384.300	19.33

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.4	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2.030.000	0	0
			1.5	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	142.500	71.25
			2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	21	21	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15.000.000	2.361.200	15.74
			2.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20	21	105.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15.000.000	2.361.200	15.74
3	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	3	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	3	3	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.661.000	1.439.600	54.10

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			3.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.111.000	1.334.600	63.22
			3.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	550.000	105.000	19.09

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan kinerja telah terlaksana di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Rreviu atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Reviu Laporan Kinerja

Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKjIP yang sebagian telah dilaksanakan di Triwulan III akan dilanjutkan di Triwulan IV untuk yang belum dilakukan monitoring tindak lanjutnya

Pengawasan Desa

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, beberapa pengawasan desa akan dilakukan perubahan bentuk pengawasan dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku agar target kinerja tetap dapat tercapai.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang di Triwulan IV

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Triwulan IV

Wonogiri, 06 Oktober 2025

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan



SRIYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SARDJITO, S.Sos.M.H
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terealisasinya pengawasan sesuai PKPT	Percentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	19	19	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	48.541.440	4.205.900	8.66
			1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.430.000	650.000	18.95
			1.2	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	8	8	100.00	Reviu Laporan Kinerja	2.000.000	264.100	13.21
			1.3	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	5	5	100.00	Pengawasan Desa	12.335.040	3.149.300	25.53

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.4	Terealisasinya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	200.000	142.500	71.25
			1.5	Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.576.400	0	0
			2	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	25	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	31.442.200	5.248.700	16.69
			2.1	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	25	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	31.442.200	5.248.700	16.69
3	Terealisasinya Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	3	Tersusunnya laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	3	3	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.661.000	1.439.600	54.10

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			3.1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	550.000	105.000	19.09
			3.2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.111.000	1.334.600	63.22

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Kerjasama Pengawasan Internal

Telah tercapai sesuai tergetnya untuk kesepakatan bersama semua Inspektur Pembantu untuk melaksanakan Rencana kerja atau Telaah Intern antar bidang untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas hasil pengawasan di semua bidang di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Telah dilakukan sinkronisasi data pemutakhiran tindak lanjut di Triwulan III sehingga beberapa kekurangan atas target monitoring tindak lanjut sampai dengan Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan rencana targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pengawasan desa dapat terlaksana sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Ketersediaan dokumen pendukungnya pedoman MCSP KPK yang dijadikan dasar dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk penyusunan perubahan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Triwulan II sehingga target dapat tercapai sesuai rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Kehadiran dalam penyelenggaraan arapat koordinasi terkait fasilitasi pengawasan untuk perumusan kebijakan pengawasan baik yang dilaksanakan dalam daerah maupun luar daerah secara daring maupun luring sesuai tupoksi bidang

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV karena pelaksanaan aktivitas telah selesai di Triwulan II dan monitoring tindak lanjut rekomendasinya juga telah terselesaikan di Triwulan III

Pengawasan Desa

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Kerjasama Pengawasan Internal

Tindak lanjut hasil kesepakatan sesuai yang telah dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 untuk melaksanaan reviu/telaah intern antar bidang telah dilaksanakan di Triwulan III sehingga tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan monitoring tas rekomendasi/ catatan hasil telaah intern pada bidang terkait

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Triwulan IV

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan III sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Wonogiri, 06 Oktober 2025



Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

SARDJITO, S.Sos.M.H
196801071994031010

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

: MURNI HASTUTI, S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
: MULYANTO, S.E.
: Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terselenggaranya penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.055.000	0	0
			2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000	1.049.750	74.98
3	Terselenggaranya barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	3	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Dokumen	3	3	100.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	999.940	979.100	97.92
4	Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian	Persentase tertib administrasi kepegawaian	4	Terealisasinya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	6	6	100.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	999.860	989.500	98.96
			5	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	18	18	100.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	700.000	35.00

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi (%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (%)		
			6	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	9	9	100.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.999.810	380.000	19.00
			7	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	3	100.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	999.860	450.000	45.01
			8	Terealisasinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	35	100.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.346.600	78.496.050	52.91
9	Terselenggaranya fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	Percentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	9	Terealisasinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.000	395.000	19.78
			10	Terealisasinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.999.110	14.362.850	26.11
			11	Terealisasinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.795.200	650.000	36.21
			12	Terealisasinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.499.800	6.111.000	94.02
			13	Terealisasinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.980	2.490.000	12.45
			14	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9	9	100.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.830.000	76.25
			15	Terealisasinya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	15	100.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.048.000	1.694.000	21.05

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			16	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.575.000	8.273.630	22.02
			17	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	999.150	90.000	9.01
			18	Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	999.860	314.500	31.45
19	Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	19	Terealisasinya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	16.67	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.820.000	5.450.000	4.79
			20	Terealisasinya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.865.700	0	0
21	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	21	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	9	9	100.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	274.000	13.70
			22	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	9	9	100.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.300.000	26.334.528	55.68
			23	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	9	9	100.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	1.750.943	19.45

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			24	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	9	100.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.833.900	103.820.500	53.84
25	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	25	Terealisasinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.694.270	12.150.000	61.69
			26	Terealisasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.188.617	42.088.552	45.16
			27	Terealisasinya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	100.00	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.520.000	76.00
			28	Terealisasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	100.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	1.616.100	32.39
			29	Terealisasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.704.000	2.101.500	31.35

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Telah tercapai sesuai rencana targetnya di Triwulan III untuk penyusunan dokumen perencanaan, yaitu Renstra 2025-2029 dan Renja 2026

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan data informasi dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) Tahun 2024

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Ketertiban pencatatan dan monitoring atas Barang Milik Daerah pada Inspektorat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Ketersediaan data informasi terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Ketersediaan data informasi terkait penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Ketersediaan anggaran dan SDM dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan rutin bulanan dalam pemenuhan penyediaan bahan bacaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan rutin bulanan dalam pemenuhan penyediaan fasilitasi tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Ketersediaan tempat arsip dan kelengkapan dokumen yang akan diarsipkan dalam penatausahaan arsip

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Ketersediaan dokumen yang akan didigitalkan menjadi dokumen elektronik untuk diunggah di laman resmi instansi sebagai indikator penilaian pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilakukan penilaiannya oleh Diskominfo Kabupaten Wonogiri

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Belum dapat terpenuhi sesuai rencana targetnya di Triwulan III

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Belum dapat terpenuhi sesuai rencana targetnya di Triwulan III

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat di SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan air, telepon, internet dan listrik di SKPD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ketersediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Ketersediaan anggaran untuk membayar gaji Non ASN dan pemenuhan kebutuhan perabot kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan untuk pimpinan SKPD dan Sekretaris

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan lapangan untuk operasional kantor

Pemeliharaan Mebel

Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin SKPD

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ketersediaan anggaran dalam pemenuhan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keterbatasan SDM di Inspektorat dengan PPKom dari Auditor sementara jumlah pengawasan dan aduan masyarakat yang harus ditangani semakin meningkat sehingga terjadi keterlambatan dari PPKom dalam menyusun KAK untuk pengajuan barang ke Bagian PBJ

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keterbatasan SDM di Inspektorat dengan PPKom dari Auditor sementara jumlah pengawasan dan aduan masyarakat yang harus ditangani semakin meningkat sehingga terjadi keterlambatan dari PPKom dalam menyusun KAK untuk pengajuan barang ke Bagian PBJ

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan Mebel

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyelesaian target yang belum terselesaikan di Triwulan IV, yaitu penyusunan dokumen penganggaran tahun 2026 sehingga target tahunannya dapat tercapai seperti yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan I sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Melanjutkan pelaksanaan administrasi BMD di Triwulan IV

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai di Triwulan IV

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Melaksanakan penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian di Triwulan IV

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Melaksanakan penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian di Triwulan IV

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Melaksanakan penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Triwulan IV

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Monitoring jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Triwulan IV

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Melanjutkan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melanjutkan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Melanjutkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Melanjutkan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Melanjutkan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Triwulan IV sesuai kebutuhan dan sisa ketersediaan anggaran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Melanjutkan pemenuhan penyediaan bahan bacaan di Triwulan IV sesuai anggaran yang ada

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tindak lanjutnya adalah melanjutkan pelaksanaan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu di Triwulan III dengan menyesuaikan sisa anggaran yang masih ada

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Triwulan IV

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tindak lanjutnya adalah melaksanakan persiapan penatausahaan arsip untuk Semester II yang akan dilaksanakan di Triwulan IV

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah melakukan monitoring atas kelengkapan dokumen yang diunggah untuk penilaian SPBE di Triwulan IV

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melakukan koordinasi dengan Bagian PBJ untuk realisasi yang belum terpenuhi di Triwulan III agar dapat terpenuhi di Triwulan IV

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Melakukan koordinasi dengan Bagian PBJ untuk realisasi yang belum terpenuhi di Triwulan III agar dapat terpenuhi di Triwulan IV

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tindak lanjutnya adalah realisasi sesuai rencana di Triwulan IV Tahun 2025 dalam Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Triwulan IV

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Triwulan IV

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di triwulan IV

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di triwulan IV

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Melanjutkan penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak di Triwulan IV dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada untuk kendaraan dinas jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melanjutkan penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak di Triwulan IV dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada untuk kendaraan dinas lapangan untuk operasional kantor

Pemeliharaan Mebel

Melanjutkan penyediaan jasa pemeliharaan mebel di Triwulan IV dengan menyesuaikan anggaran yang masih ada

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Triwulan IV

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan pemeliharaan BMD gedung kantor dan bangunan lainnya di Triwulan IV

Wonogiri, 06 Oktober 2025

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2025

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M
Jabatan Pelapor : Kepala Sub Bagian Keuangan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MULYANTO, S.E.
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan				
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terselenggaranya administrasi keuangan daerah yang disusun	Percentase administrasi keuangan daerah yang disusun	1	Terealisasinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	41	41	100.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.492.023.755	4.732.481.696	63.17
			2	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	975.000	97.50
			3	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	11	11	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.000.000	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Ketersediaan data yang didukung oleh kerjasama pegawai mempercepat penyelesaian laporan keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Ketersediaan data keuangan dan koordinasi dengan BPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan I

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Menjalankan aktivitas keuangan mengikuti aturan yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dengan BPKD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Target tahunan sesuai Perjanjian Kinerja telah terselesaikan 100% di Triwulan I sehingga sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Tindak lanjutnya adalah melanjutkan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD di Triwulan IV

Wonogiri, 06 Oktober 2025

Sekretaris



MULYANTO, S.E.
196806181993031010

Kepala Sub Bagian Keuangan



LANTIN ISTINGGAR, S.E., M.M.
197404201997032002